

Gerakan Perempuan di Jawa Barat Pada Era Reformasi: Studi Kasus Gerakan Perempuan Rumpun Indonesia, Samahita, dan Koalisi Perempuan Indonesia

Women's Movements in West Java During The Reform Era: A Study of the Rumpun Indonesia, Samahita, and Koalisi Perempuan Indonesia

Antik Bintari

Universitas Padjajaran, Jawa Barat, Indonesia

a.bintari@unpad.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 13 Oktober 2025, direvisi 21 Desember 2025, diputuskan diterima 17 Januari 2026

Abstract

West Java continues to face significant gender inequality, making women's organizations key political actors in social change. This study examines women's movements in West Java during the Reform Era (2018–2023) through the lens of political opportunity, mobilization structures, and framing processes. Using feminist research methods, including interviews, online and offline focus group discussions, literature review, and documentation, this study analyzes independent women's organizations that are neither state-formed nor party-affiliated. The findings show that the growth, sustainability, and impact of women's movements are shaped by political opportunities, contestation of ideas, and collective practices of mobilization and public engagement.

Keywords: Social Movements, Women's Movements, Reform Era

Abstrak

Jawa Barat masih menghadapi ketimpangan gender sehingga peran organisasi perempuan menjadi penting dalam perubahan sosial. Penelitian ini mengkaji dinamika gerakan perempuan di Jawa Barat pada Era Reformasi (2018–2023) melalui kerangka kesempatan politik dan struktur mobilisasi. Dengan metode penelitian feminis, data dikumpulkan melalui wawancara, FGD daring dan luring, studi pustaka, dan dokumentasi terhadap organisasi perempuan independen yang tidak berafiliasi dengan negara maupun partai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan, keberlanjutan, dan efektivitas gerakan perempuan ditentukan oleh peluang politik, pertarungan gagasan, serta praktik mobilisasi dan pencarian dukungan publik.

Kata kunci: Gerakan Sosial, Gerakan Perempuan, Era Reformasi

Pendahuluan

Berkembangnya sistem politik demokratis membuka ruang bagi warga negara, termasuk perempuan, untuk menyuarakan ketidakadilan dan memobilisasi diri dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan gender. Dalam masyarakat demokratis, kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan membangun klaim kolektif menjadi prasyarat bagi kemunculan dan keberlangsungan gerakan sosial. Sebaliknya, tatanan politik otoritarian membatasi kapasitas masyarakat untuk mengorganisir diri dan menantang relasi kuasa yang tidak adil. Karena itu, gerakan perempuan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam praktik demokrasi, yakni ketika perempuan secara kolektif menyuarakan pengalaman, kepentingan, dan tuntutan politiknya. Demokrasi, seperti yang ditulis Jill Bystydzienski dan Joti Sekhon (1999):

“... memungkinkan realisasi penuh dari potensi kreatif manusia. ... [dan] dengan demikian mendukung perkembangan nilai dan struktur yang mempromosikan dan memberi orang suara langsung dalam hal-hal yang memengaruhi kehidupan mereka.”

Pandangan tentang demokrasi sebagai proses suara warga biasa menemukan ekspresi yang semakin terorganisir dalam lembaga-lembaga sosial tercermin dalam banyak studi tentang gerakan perempuan, yang menempatkan gerakan perempuan sebagai bentuk utama ekspresi kolektif perempuan dan praktik kewargaan demokratis (Beckwith 2005).

Dalam penelitian ini, gerakan perempuan dipahami sebagai artikulasi kolektif keinginan dan kepentingan perempuan Indonesia. Mengikuti Wieringa (1999), definisi yang luas digunakan untuk menangkap heterogenitas dan kompleksitasnya, yakni sebagai spektrum tindakan, kegiatan, kelompok, dan organisasi,

baik individual maupun kolektif, yang berupaya mengurangi berbagai bentuk subordinasi gender yang saling berjalanan dengan penindasan berbasis kelas, ras, etnis, usia, dan seks.

Sejalan dengan Mazur dan McBride (2008), gerakan perempuan dipahami sebagai aksi kolektif perempuan yang secara eksplisit mengajukan tuntutan di ranah publik atas dasar identitas gender sebagai perempuan. Dengan demikian, definisi ini mencakup dua unsur utama, yakni aksi kolektif yang terorganisasi dan klaim identitas gender. Lebih lanjut, Mazur dan McBride (2010) menegaskan bahwa karakteristik mendasar gerakan perempuan terletak pada wacana dan aktor, ketika wacana mencakup gagasan, tujuan, dan klaim berbasis identitas gender perempuan, sementara aktornya adalah kolektif perempuan yang bergerak di ranah sosial-politik di luar struktur negara.

Reformasi 1998 membawa perubahan pada situasi politik di Indonesia, setidaknya dari sistem otoriter menuju demokrasi, dari sistem pemerintahan yang tersentralisasi menjadi terdesentralisasi, dan dari supremasi militer ke supremasi sipil. Perubahan ini membawa implikasi bagi gerakan sosial politik di Indonesia termasuk gerakan perempuan. Menarik untuk dicermati lebih lanjut bila dikaitkan dengan gerakan perempuan di Jawa Barat yang selama ini gaungnya kurang muncul bahkan mungkin cenderung redup tertutup dengan berbagai cerita heroik lainnya yang sangat maskulin. Gerakan perempuan di Jawa Barat sesungguhnya bagian dari sejarah perjuangan gerakan perempuan di Indonesia. Meskipun beberapa tokoh perempuan di Jawa Barat, seperti Dewi Sartika, Raden Ayu Lasminingrat, dan Emma Poeradiredja hadir dalam catatan sejarah perjuangan perempuan di masa kolonial namun sulit ditemukan gerakan dalam bentuk aksi kolektif yang dilakukan perempuan di Jawa Barat dalam periode tersebut, termasuk periode selanjutnya (Orde Lama dan Orde Baru).

Pada masa kolonial, organisasi Pasundan Istri menunjukkan keterlibatan perempuan Jawa Barat dalam perjuangan kemerdekaan, termasuk melalui partisipasi politik dan penyelenggaraan Kongres Perempuan yang menetapkan 22 Desember sebagai Hari Ibu. Organisasi ini tetap bertahan hingga masa kemerdekaan dan masih aktif dalam kegiatan sosial. Namun, sebagaimana dicatat Rahayu (2007), sejarah perempuan Indonesia cenderung menampilkan figur-figur perempuan sebagai tokoh individual dari kalangan elite sehingga menutupi keberadaan perempuan sebagai subjek kolektif dalam gerakan sosial.

Kemunculan berbagai organisasi perempuan atau aksi-aksi kolektif di Jawa Barat di masa Reformasi berlangsung seperti halnya di Jakarta dan kota lainnya yang dipengaruhi oleh sistem politik demokrasi. Demokratisasi di Indonesia setelah Reformasi 1998 telah membuka akses bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan kebijakan (Dhewy 2019). Kepustakaan arus besar tentang demokrasi umumnya berfokus pada transformasi institusional yang terjadi selama proses demokratisasi namun abai terhadap dimensi relasi gender yang menjelaskan kerumitan. Bahkan, kontradiksi interaksi antara gerakan perempuan, proses demokratisasi, serta tiga agensi elektoral, yakni partai politik, pemilu, dan legislatif (Margret 2019). Transisi demokrasi yang diukur dengan kriteria kebaikan yang netral gender mengorbankan suara dan kepentingan perempuan (Jaquette dalam Margret 2019).

Di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, organisasi perempuan berkembang pesat, mulai dari yang berbasis keagamaan hingga yang berorientasi pada pembangunan ekonomi, politik, dan pemikiran kritis. Organisasi-organisasi ini biasanya memberikan peningkatan kapasitas kepada aktor lokal melalui pelatihan, pendidikan publik, dan pengorganisasian masyarakat. Namun demikian, ada dugaan bahwa tidak semua gerakan perempuan baik yang dimotori langsung oleh perempuan ataupun membawa isu perempuan serta merta dikategorikan sebagai gerakan feminis.

Di berbagai konteks Asia, misalnya, terdapat perbedaan antara perempuan dan feminisme, tepatnya antara gerakan feminis dan gerakan perempuan. Stivens (Stivens 2000, hlm. 31) mencatat bahwa kalangan aktivis perempuan Islam di Malaysia lebih merasa pas menggunakan istilah "*womanist*" dibandingkan istilah "*feminist*". Bahkan kalangan akademisi dan peneliti Cina, lebih suka menggunakan istilah *feminology* untuk membedakan diri mereka dari teori-teori feminis Barat (Edwards 2010, hlm. 53). Kelihatannya sampai sejauh ini, istilah feminis masih dianggap "sesuatu" yang berasal dari luar diri "mereka" sehingga banyak perempuan, terutama kalangan akademisi dan peneliti, lebih nyaman menjadi bagian dari Kajian Wanita (*Women's Studies*) daripada kelompok feminis (Arivia & Subono 2017). Gerakan perempuan dengan agenda feminis dapat digambarkan dengan sejumlah karakter mengedepankan pengalaman khas perempuan dalam relasi gender di masyarakat, isu-isu perempuan, kepemimpinan perempuan, dan kehadiran perempuan dalam proses penyusunan kebijakan (Beckwith 2000).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis gerakan perempuan di Jawa Barat pada Era Reformasi. Mengikuti Beckwith (2007), studi tentang gerakan perempuan berupaya menelusuri aktor-aktor perempuan yang terorganisasi, mengkontekstualisasikannya secara spasial, serta membandingkan dinamika gerakan dan respons negara maupun aktor lain. Era Reformasi dipilih karena merupakan periode perubahan politik yang signifikan, yang membentuk dinamika gerakan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Metode Penelitian

Sejalan dengan fokus penelitian yang memetakan bagaimana kesempatan politik dan proses demokratisasi memberi ruang organisasi dan gerakan perempuan di Jawa Barat berpartisipasi, penelitian ini menggunakan metode riset feminis. Feminisme memandang patriarki sebagai struktur kekuasaan yang menghasilkan bias androsentris dan seksisme dalam produksi pengetahuan, dengan menempatkan laki-laki sebagai pusat dan mengabaikan perspektif lain (Hesse-Bieber 2011). Untuk itu, riset feminis memulai proyek berupaya mengoreksi bias tersebut dengan memasukkan semua jenis kelamin dalam pengetahuan, sambil memastikan untuk tidak menyamaratakan situasi suatu kelompok. Faktor-faktor lain, seperti ras, kelas, orientasi seksual, dan konteks budaya juga berperan. Ini adalah tugas bagi para feminis untuk mencoba menjadi seinklusif mungkin (van Witteloostuijn 2013).

Penelitian ini menggunakan pendekatan feminis yang berpusat pada pengalaman perempuan yang beragam serta pada institusi dan struktur yang membingkai pengalaman tersebut (Creswell 2007). Dengan pendekatan partisipatoris, penelitian ini mengikuti Alvarez (1990) yang memandang gerakan perempuan sebagai gerakan sosial-politik yang terutama digerakkan oleh perempuan untuk memperjuangkan kepentingan gender. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga organisasi perempuan di Jawa Barat, yaitu Samahita, Rumpun Indonesia, dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).

Kesempatan Politik

Pasca-Orde Baru ditandai oleh meningkatnya partisipasi masyarakat sipil, termasuk perempuan, dalam mengadvokasi kebijakan publik. Di era reformasi, organisasi perempuan berbasis agama maupun sekuler dan progresif berkembang pesat dengan beragam

ideologi, isu, dan strategi perlawanan. Penelitian ini bertujuan memetakan peluang politik dan struktur kultural ketiga organisasi/gerakan perempuan, yakni Rumpun Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Samahita.

Pasca-1998, gerakan perempuan semakin berkembang, termasuk yang berada di Jawa Barat. Fase ini termasuk fase kontemporer seperti yang disampaikan Gadis Arivia dan Nur Iman Subono (2017) yang diwarnai oleh beragam diskursus dan penelitian kritis yang diproduksi oleh organisasi-organisasi perempuan. Dalam perspektif gerakan sosial menurut Singh (2001) negara menjadi medan pertempuran organisasi perempuan. Hal ini berkenaan dengan struktur kesempatan politik yang memang membuka ruang-ruang diskursus bagi banyak kelompok-kelompok di masyarakat.

Ruang Media Perempuan (Rumpun) Indonesia merupakan salah satu bentuk gerakan sosial perempuan di Jawa Barat yang berfokus pada isu antikorupsi. Organisasi ini diprakarsai oleh aktivis perempuan, salah satunya berlatar belakang Indonesia Corruption Watch dan mengusung visi "Keluarga Indonesia Berintegritas" melalui media seni dan komunikasi partisipatif. Rumpun menegaskan dirinya sebagai organisasi berideologi nasionalis. Penekanan pada perempuan didasarkan pada pemaknaan tubuh dan peran ibu sebagai sumber pembentukan nilai, karakter, dan etika sosial, sebagaimana juga ditegaskan oleh para narasumber penelitian ini.

"Rumpun Indonesia sebenarnya hadir saat ada gerakan save KPK...isunya itu karena saya di ICW ...gerakan-gerakan yang sebelumnya sangat maskulin, saya melihatnya orangnya itu lagi itu lagi yang bergerak, dan sangat laki-laki dan kurang partisipatif, kurang melibatkan perempuan... Akhirnya, ada kelompok Perempuan Anti Korupsi bikin Sembilan gebrakan perempuan...kemudian teman-teman di Bandung yang punya *concern* yang sama bertemu. Tahun 2014, kami lanjut bikin kegiatan Sembilan gebrakan perempuan. Setelah itu, karena relasinya berkembang dan positif serta memang dari awalnya saling *ngebantu* di WA grup, akhirnya lanjut berkumpul dan membuat kegiatan-kegiatan lanjutan...Isu korupsi kemudian terus naik, kita bikin ciri khas *tagline*-nya keluarga anti korupsi dan kita melawan korupsi dari rumah...kita menggunakan simbol perlawanan dengan cap-cap tangan...karena kegiatan kita harus partisipatif dan menggunakan tubuh kita, menggunakan *free day* dan sekolah-sekolah—gongnya di Hari Perempuan Internasional deklarasi keluarga pemberantas korupsi. Setelah itu, semakin banyak komunitas yang terlibat, kampanyenya nilai-nilai integritas KPK, dan kata kunci 'sabar' karena korupsi berawal dari ketidaksabaran – di Hari Korupsi Nasional melibatkan 300 komunitas" (SM 2021, Diskusi Terarah 30 Maret),

Dalam sejarah pembentukan KPI, kongres yang dihadiri oleh lebih dari 500 aktivis perempuan dari berbagai kalangan dan daerah menunjukkan bahwa isu perempuan cukup kuat diperjuangkan di berbagai daerah dengan beragam kepentingan dan bidang garapan. Kongres itu berhasil mengidentifikasi dan menyepakati 15 sektor kegiatan, antara lain petani, nelayan, pekerja rumah tangga, buruh migran, pekerja seks komersial (yang kemudian diganti nama menjadi perempuan yang dilacurkan), ibu rumah tangga, lansia, buruh anak, dan LGBTQ+. Adapun yang menjadi semangat atau spirit di balik pembentukannya adalah dengan basis massa yang independen atau otonom. Ini artinya, berupaya terlepas dari kontrol atau kendali negara sebagaimana umumnya organisasi massa pada Orde Baru. KPI memiliki asas organisasi ini adalah demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan gender, serta keberagaman dengan ideologi feminisme sebagai landasannya. Asas organisasi ini adalah kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini ditegaskan kembali oleh tokoh KPI Jawa Barat dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“KPI merupakan organisasi gerakan massa perempuan yang bersifat independen, berdiri sejak tahun 1998 pasca-Reformasi, tetapi untuk Jawa Barat baru terbentuk pada tahun 2003. Fokus kegiatan ada dua, yakni penguatan organisasi dan reformasi kebijakan publik. Meskipun secara nasional ada 18 kelompok kepentingan yang diperjuangkan, di Jawa Barat sendiri baru ada 8 kelompok yang diperjuangkan, yaitu Perempuan Ibu Rumah Tangga, Perempuan Lansia, PPM (Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa), Perempuan Sektor Informal, Perempuan Profesional, Perempuan Petani, Perempuan Nelayan, dan Perempuan Buruh Migran. Pembagian ini harus didasarkan pada kelompok kepentingan karena setiap kelompok memiliki persoalan yang berbeda” (DW 2021, Diskusi Terarah 27 Maret).

KPI sendiri menegaskan bahwa asas yang diusung adalah demokrasi. Namun demikian, narasumber mengungkapkan bahwa perjalanan demokrasi yang baik termasuk dalam hal partisipasi perempuan masih panjang dan berhadapan dengan beragam isu. Narasumber mengungkapkan lebih lanjut sebagai berikut:

“Bicara demokrasi, di KPI dasarnya adalah demokrasi. Pekerjaan rumah kita masih panjang melawan proses demokrasi yang menyimpang, seperti politik uang, politik identitas, dan penyimpangan dalam demokrasi lainnya. Selain itu, pasca-Reformasi semua orang bahkan perempuan diberikan ruang berpendapat untuk perbaikan sistem ke negara, tetapi prosesnya tidak semudah itu ketika di lapangan. Oligarki masih terjadi dan contohnya di Indramayu meski sudah mulai terkikis tetapi tetap bermunculan oligarki baru. Di KPI, sebetulnya sudah ada

pendidikan pilih perempuan. Tentunya, tujuannya untuk perbaikan demokrasi Indonesia ke depannya” (DW 2021, Diskusi Terarah 27 Maret).

Samahita adalah komunitas yang menyuarakan isu gender untuk kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan memerangi kekerasan atau pelecehan seksual, termasuk isu LGBTQ yang selama ini dianggap tabu untuk dibicarakan di ruang-ruang publik, khususnya di masyarakat Jawa Barat yang sering kali mengklaim diri sebagai provinsi yang religius. Samahita berkantor dan memiliki sekretariat berlokasi di Kota Bandung. Samahita berasal dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti tegar atau kuat. Dalam bahasa Batak, Samahita adalah akronim dari Sama dan Hita, yang artinya bersama kita.

Samahita dibentuk tahun 2015 oleh 6 orang inisiatornya yang keseluruhannya adalah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung. Menjadi menarik karena sebagian besar pengurus dan relawan merupakan perempuan di usia relatif muda yakni 15--30 tahun. Ketua Komunitas Samahita, bercerita bahwa awal terbentuk Samahita terinspirasi dari aksi kolektif/gerakan global bernama *One Billion Rising* (OBR)¹ yakni sebuah gerakan global pada tahun 2012 yang didirikan oleh Eve Ensler untuk mengakhiri perkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Selain itu, Samahita dibentuk atas dasar banyaknya korban pelecehan dan kekerasan berbasis gender lainnya yang sering kali tidak tertangani. Hal ini seperti yang terungkap dalam hasil wawancara dengan pendiri Samahita yang menyebutkan:

“Samahita mulai bergerak di tahun 2013. Dahulu namanya bukan Samahita, namun merupakan kampanye global yang diadakan serentak di dunia dan salah satunya di Indonesia dan Bandung merupakan salah satu kota yang mengadakan juga. Namun pada tahun 2014, semakin banyak yang tertarik dan mengikuti. Pada tahun 2015, mulai banyak korban yang bercerita kepada kami terkait kekerasan yang dialami, berkonsultasi kepada kami harus bagaimana sehingga pada suatu saat, datanglah kepada kami satu kasus yang membuat kami berpikir bahwa tidak bisa kami menggunakan nama kampanye global sebagai pergerakan kami. Pada akhirnya pada tahun 2015, kami sepakat membutuhkan wadah yang fokus ke dalam isu Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) remaja. Pada 16 Februari 2015, dibentuklah Samahita yang tujuannya memberi dukungan bagi korban atau penyintas kekerasan seksual. Tetapi seiring perkembangannya, kami juga fokus pada isu kekerasan berbasis gender. Pendiri Samahita adalah mahasiswa dari lintas kampus dan lintas jurusan yang menjadi korban atau penyintas kekerasan seksual yang pada saat itu bingung ketika mengalami kekerasan tersebut harus melapor ke mana dan kepada siapa” (AY 2021, Diskusi Terarah 9 April).

Gerakan perempuan seperti gerakan atau aksi kolektif lainnya memanfaatkan kondisi kesempatan politik dalam konteks demokrasi untuk bisa lebih berkembang. Di era reformasi, perempuan cenderung memiliki peluang lebih besar dalam aktivitasnya di ruang-ruang publik melalui berbagai media yang mereka miliki tanpa takut adanya represi dari penguasa. Upaya ekspansi ini juga didukung oleh kondisi struktural yang memberikan kesempatan gerakan untuk berkembang, dengan aktivis perempuan yang mulai menyampaikan ide-ide gerakan. Kondisi yang dimaksud di atas tampak pada kehadiran ketiga organisasi perempuan yang diteliti. Ketiganya dapat dikatakan "diuntungkan" oleh kondisi struktur politik melalui gerakan reformasi yang terjadi sebelumnya. Narasumber dari Samahita mengungkapkan lebih lanjut mengenai pemahamannya tentang demokrasi dan kaitannya dengan aktivisme gerakan perempuan seperti kutipan di bawah ini:

"Jika disebut adakah perubahan, pasti ada walaupun sedikit. Setidaknya saat ini sudah memasukkan isu gender dalam berbagai kebijakan yang dirancang maupun kebijakan yang sudah disahkan. Beberapa kebijakan juga sudah sensitif gender. Koinfo saat ini sudah berbicara kesenjangan digital yang berbasis gender juga. Menurut saya, sangat terlihat perubahannya sebelum reformasi dan setelah reformasi. Namun, tetap saja karena sistem dan pola pikir pemerintah dan pembuat kebijakan yang belum berubah dan masih patriarki menjadi kebijakan saat ini hanya sebatas formalitas saja. Dengan demikian menurut saya, saat ini demokrasi masih belum berpihak sepenuhnya kepada perempuan" (AY 2021, Diskusi Terarah 9 April).

Secara ideologi, Samahita memastikan mereka memiliki ideologi feminis karena menurut narasumber, ideologi inilah yang paling tepat bila dihubungkan dengan hal-hal, seperti isu ketertindasan perempuan, minoritas, dan isu-isu lingkungan. Narasumber juga mengungkapkan bahwa prinsip kerja yang digunakan adalah *transformative justice*. Gerakan perempuan Era Reformasi sesungguhnya bagian dari gerakan sosial baru yang dapat berjalan pada sebuah sistem politik yang demokratis. Beberapa hal yang menjadi catatan dalam memperkuat aksi kolektif yang dilakukan perempuan yakni salah satunya perlu memperkuat platform gerakan perempuan.

Meskipun ketiga organisasi dalam penelitian ini berkembang pasca-Reformasi, kemunculannya tidak sepenuhnya baru karena struktur kesempatan politik hanya menyediakan medium bagi gerakan yang telah memiliki basis, tujuan, dan strategi. Sejarah gerakan perempuan di Indonesia menunjukkan kontinuitas ini, sebagaimana ditunjukkan oleh Wieringa (1999) dalam

kajiannya tentang Gerwani, yang sejak awal 1950-an telah beroperasi dalam konteks politik yang penuh tekanan.

Proses demokratisasi pasca-Reformasi membuka ruang yang sangat besar bagi gerakan perempuan untuk mengekspresikan kebutuhan, tuntutan, dan dukungan pada isu-isu gender itu sendiri. Hal ini sangat tampak pada kemudahan ketiga aksi kolektif di Jawa Barat untuk mendapatkan akses dan jejaring serta berkecenderungan tidak berhadapan dengan tindakan represif yang dilakukan negara ataupun kelompok lainnya pada saat membentuk organisasinya termasuk aktivitas selanjutnya yang hadir di ruang-ruang publik.

Kesempatan politik dalam penelitian ini juga mengacu pada bagaimana agensi organisasi perempuan di Jawa Barat terlibat secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik yang responsif gender di Provinsi Jawa Barat. Salah satu isu yang diperjuangkan adalah isu Perkawinan Anak di Jawa Barat, KPI Jawa Barat dengan dukungan Oxfam Indonesia melalui program *STRONGER (Sustainable Intervention Greater Voices, and Change the Barrier on Violence Against Women and Girls)*, secara terus-menerus melakukan upaya pencegahan perkawinan anak melalui diskusi-diskusi, pelatihan-pelatihan, dan mendorong lahirnya kebijakan di daerah. KPI Jawa Barat juga berkontribusi dalam lahirnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 tentang Pencegahan Ekstremisme di Provinsi Jawa Barat serta terlibat aktif dalam mengawal perjalanan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Jawa Barat. Narasumber mewakili KPI juga mengungkapkan bahwa implikasi demokrasi dan desentralisasi sudah semestinya memengaruhi tingkat partisipasi organisasi perempuan dalam perumusan kebijakan publik, khususnya di Jawa Barat.

"Harapan saya, terutama di Jawa Barat, ketika regulasi sudah ada bahkan program gubernur lebih mengakomodasi perempuan. Tetapi menurut saya, jika sudah ada kebijakan, saya ingin melihat komitmen pemerintah bagaimana implementasi peraturan daerah (perda) tersebut, misal diturunkan ke peraturan gubernur (pergub). Dari pergub tersebut, saya berharap bangun komitmen bersama dengan pemerintah kabupaten sampai dengan desa. Karena rata-rata regulasi di provinsi hanya dibuat saja, tidak dijalankan dengan program. Tetapi apakah sudah dievaluasi peraturan tersebut sesuai kebutuhan masyarakat?" (ZA 2021, Diskusi Terarah 27 Maret).

Dalam upaya mengadvokasi dan mengawal proses legislasi Raperda Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Jawa Barat, KPI Jawa Barat menggelar

diskusi bertajuk “Strategi Kampanye Orang Muda dalam Upaya Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan pada tanggal 21 Maret 2023.” Fokus dari program ini adalah keadilan gender yang bertujuan untuk meningkatkan posisi kaum muda, perempuan, dan kelompok-kelompok yang dikecualikan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Gender Transformative Approach* (GTA), penyertaan kaum muda, dan pelibatan laki-laki secara eksplisit.²

Periode kepala daerah berikutnya (2018--2023) dengan latar belakang partai pengusung yang berbeda (partai yang bukan berbasis agama) menyebabkan terjadi perbedaan kebijakan tentang penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Jawa Barat. Pada tahun 2019, menginisiasi program Sekolah Perempuan dengan pemimpinya adalah DP3AKB Provinsi Jawa Barat dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) di tiap tahunnya. Sekoper Cinta atau Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita atau bisa juga disebut dengan Sekoci adalah program pemerintah provinsi Jawa Barat yang juga menjadi program *quick wins* 100 hari kerja Gubernur Jawa Barat, sebagai salah satu program yang hadir untuk merespons tingginya angka perceraian, tingginya kasus stunting, perdagangan manusia, dan kasus kekerasan berbasis gender di Jawa Barat. Program ini menjadi wadah perempuan di Jawa Barat sebagai tempat saling tukar wawasan dan pengalaman; menemukan dan mengenali kebutuhan serta kepentingan perempuan untuk mencapai dan meningkatkan kualitas hidup perempuan serta menjadi upaya mewujudkan Perempuan Jawa Barat juara yang mampu memberdayakan diri, keluarga dan lingkungan sekitarnya.³

DP3AKB juga menganggarkan secara rutin tiap tahunnya untuk pembinaan organisasi perempuan yang tergabung dalam Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) dan ada dalam program kerja DP3AKB di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Organisasi perempuan lainnya baik yang berbasis agama maupun yang bukan berbasis agama menjadi mitra kerja dalam penyusunan berbagai kebijakan di tingkat daerah, seperti dalam penyusunan peraturan gubernur (Pergub) pencegahan perkawinan anak dan pencegahan radikalisme.

Kesempatan politik menjadi medium organisasi atau gerakan perempuan untuk merepresentasikan dirinya sebagai bagian dari perubahan sosial politik. Di Jawa Barat, baik gerakan perempuan berbasis agama maupun yang bersifat sekuler menunjukkan ciri gerakan sosial baru melalui keterlibatan mereka

dalam isu kebijakan dan artikulasi kepentingan publik dengan strategi yang beragam. Pilihan strategi, terutama kerja berjejaring, sangat dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan situasi sosial pada masanya, termasuk pembacaan terhadap momentum, peluang, dan hambatan. Keberhasilan jejaring ditentukan oleh kesepakatan bersama atas isu yang diperjuangkan serta kesediaan menanggalkan kepentingan organisasi masing-masing. Dalam konteks otonomi daerah, peluang ini dimanfaatkan untuk mendorong dan mengawal kebijakan pemerintah daerah yang lebih pro-perempuan di Jawa Barat.

Penelitian menegaskan bahwa studi tentang gerakan perempuan tidak dapat direduksi pada politik elektoral semata. Selama ini, kajian politik sering hanya mengakui gerakan perempuan sebagai objek Ilmu Politik ketika berkaitan dengan keterwakilan di parlemen atau pemilu, seolah-olah aktivisme perempuan di luar arena tersebut tidak memiliki makna politik. Padahal, gerakan perempuan justru beroperasi sebagai praktik politik dalam arti yang lebih luas, yakni dalam perjuangan atas kepentingan dan relasi kuasa gender.

Dalam konteks Indonesia, organisasi perempuan berbasis agama, seperti Aisyiyah, Fatayat NU, dan Wanita Katolik Republik Indonesia pada kenyataannya tidak bergantung pada terbuka atau tertutupnya kelembagaan sistem politik. Pun tidak terpengaruh dengan stabil atau tidak stabilnya hubungan antar kelompok. Hal ini dibuktikan kehadiran mereka pada setiap rezim politik di Indonesia, termasuk di Era Kolonialisme (sebelum kemerdekaan). Sebelum Era Reformasi, tidak mudah bagi gerakan perempuan di Indonesia termasuk di Jawa Barat untuk mengungkap kebutuhan strategis gender, seperti isu keterwakilan perempuan, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan kekerasan seksual. Isu-isu global tidak mudah diadopsi, walaupun diupayakan, akan mudah dicurigai dan dianggap lawan dari pemerintah atau melawan nilai-nilai terkait pemahaman agama dan budaya. Gerakan perempuan di Jawa Barat baik yang berbasis agama maupun sekuler berkecenderungan memanfaatkan negara sebagai medan pertempuran berbagai kepentingan gender praktis dan strategis.

Organisasi perempuan berbasis agama minoritas, seperti Kristen, Hindu, Budha, dan Penghayat di Jawa Barat belum mampu memaksimalkan aktivitasnya di ruang publik termasuk bermitra dengan pemerintah daerah dalam mengupayakan berbagai kebijakan pro-gender di Jawa Barat. Hal ini dikarenakan untuk Puan Hayati (penghayat) masih memerlukan adaptasi

dengan situasi yang sebelumnya menolak kehadiran mereka sehingga membangun kekuatan, kapasitas, dan kepercayaan diri di dalam organisasi menjadi fokus perjuangan mereka. Berdasarkan hal tersebut di atas, apa yang disampaikan Singh (2001) dapat diterima bahwa sesungguhnya negara sebagai medan pertempuran organisasi gerakan. Disepakati pula bahwa sistem masyarakat yang demokratislah prasyarat munculnya gerakan sosial, termasuk gerakan perempuan dengan berbagai isu yang diperjuangkan baik tentang kebutuhan praktis gender maupun kebutuhan strategis gender.

Namun, asumsi Singh bahwa para pelaku gerakan pada umumnya berasal dari kelas menengah baru (*new middle class*), tidak sepenuhnya terkonfirmasi dalam penelitian ini. Sebagian besar organisasi perempuan di Jawa Barat justru berakar pada kelompok marginal, meskipun dalam praktiknya mereka kemudian berkolaborasi dengan kelas menengah untuk memperluas jangkauan isu dan basis pendukung, sebagaimana terlihat pada KPI Jawa Barat. Sejalan dengan Singh, hampir semua organisasi yang diteliti juga memanfaatkan pendekatan budaya dan teknologi sebagai strategi mobilisasi dan penguatan, sesuai dengan kerangka McAdam, McCarthy, dan Zald (2016).

Dalam konteks yang lebih luas, demokratisasi pasca-1998 membuka ruang negosiasi politik yang berkelanjutan, memungkinkan artikulasi identitas, dan kepentingan yang lebih beragam, termasuk yang berbasis pada budaya, kelas, gender, dan lingkungan hidup. Penguatan nilai-nilai lokal dan nilai-nilai agama, yang selama ini tertekan juga berlangsung seiring dengan terbukanya ruang demokrasi tersebut.

Pasca-1998, gerakan perempuan memiliki kesadaran baru sebagai kelompok yang aktif mendefinisikan permasalahan dan politiknya sendiri, bukan lagi sebagai kelompok pendukung agenda politik organisasi lain. Gerakan perempuan ternyata menjadi semakin meluas, dari sisi wilayah kerja maupun persebaran geografisnya, serta makin beragam jumlah aktornya, bidang kerjanya, dan bahkan pendefinisian persoalan gender. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan para ahli proses politik yang melihat aspek politik sebagai aspek yang paling berpengaruh bagi kemunculan dan nasib suatu protes sosial atau yang mereka sebut sebagai *favourable political context*, yang mengacu pada bagaimana komponen politik di luar mereka bekerja (seperti negara dan institusi politik), memengaruhi apa yang protester lakukan, kapan, dan bagaimana mereka melakukannya. Meskipun ada banyak aspek lain yang mengelilingi

kemunculan dan nasib suatu protes sosial, seperti kegelisahan sosial atau sumber daya, organisasi dan strategi gerakan sosial, namun konteks politik adalah yang paling berpengaruh. Hal tersebut juga berkaitan dengan lawan dan tujuan dari protes sosial secara umum, yaitu upaya untuk melawan dan memperoleh kekuatan politik (Kriesi 2005).

Untuk mewujudkan tujuan suatu gerakan sosial, diperlukan visi dan misi yang jelas. Melalui visi dan misi, organisasi dapat merencanakan arah masa depan serta memperjelas apa yang ingin dicapai dan diperjuangkan. Selain menjadi penunjuk arah, visi dan misi juga berfungsi sebagai batasan dalam pengambilan kebijakan sehingga meminimalkan keputusan yang menyimpang dari tujuan organisasi. Dalam konteks ini, baik organisasi perempuan berbasis agama maupun yang bersifat sekuler tampak telah memiliki visi dan misi yang relatif jelas. Dengan tingkat pengorganisasian serta visi dan misi yang kuat, gerakan perempuan akan memiliki daya tawar dan kekuatan politik yang lebih besar.

Struktur Mobilisasi

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Barat merupakan bagian dari Koalisi Perempuan Indonesia. Seperti halnya organisasi perempuan berbasis agama yang memiliki struktur di pusat atau tingkat nasional, maka struktur mobilisasi terkait program-program prioritas sejalan dengan apa yang telah ditetapkan di tingkat pusat. Dalam salah satu kutipan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa jumlah keanggotaan di Jawa Barat diperkirakan berada di kisaran 4000 orang. KPI Jawa Barat memiliki sumber daya manusia sampai ke akar rumput (desa/kelurahan) sesuai dengan struktur organisasinya yang berbasis desa (*bottom up*) yang dikenal dengan istilah Bale Perempuan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber:

"Anggotanya individu, semua perempuan di atas 18 tahun. Jika di bawah 18 tahun, kita sebut sebagai anggota persiapan. Struktur kita sampai tingkat desa (Bale Perempuan). Kalau di tingkat cabang, ada struktur kita ada eksekutif dan legislatif. Di Jawa Barat terdapat beberapa cabang, yakni Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sukabumi. Yang belum terbentuk cabangnya dan baru terbentuk Dewan Kelompok Kepentingan PPM yakni Kabupaten Kuningan. Cabang yang tidak aktif di antaranya Cianjur, Kota Bandung, Karawang, Bekasi, dan Depok. Tidak aktif dikarenakan pengurus yang dulu salah satunya berpindah tempat ke kota lain" (DW 2021, Diskusi Terarah 27 Maret).

Sementara, kelompok kepentingan yang diusung di KPI Jawa Barat terdapat kurang lebih sembilan kelompok kepentingan saja⁴, yakni Perempuan buruh dan buruh migran; Perempuan Ibu Rumah Tangga; Perempuan Lansia; Pemuda, pelajar, dan mahasiswa; Perempuan pesisir dan nelayan; Perempuan sektor informal; Perempuan profesional; Perempuan petani; Perempuan janda, perempuan kepala keluarga dan lajang Sementara, beberapa kelompok kepentingan lainnya, seperti kelompok perempuan masyarakat adat, perempuan yang dilacurkan, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan masyarakat miskin kota dan desa, serta terkait penyandang disabilitas dan LGBT belum dapat direalisasikan atas dasar beberapa pertimbangan. Kelompok kepentingan lainnya belum dilaksanakan, dikarenakan jumlah anggota kelompok kepentingan belum ada dan juga jumlahnya masih sedikit. Hal ini seperti yang disampaikan oleh narasumber dalam wawancara melalui *whatsapp* di bawah ini:

“Untuk kelompok kepentingan (KK) yang belum ada, dikarenakan jumlah anggota kelompok kepentingan belum ada dan juga jumlahnya makin sedikit. Juga ketika kongres wilayah, tidak ada yang mencalonkan sebagai presidium wilayah sehingga tidak ada presidium wilayah yang mewakili kelompok kepentingan tersebut. Di samping itu, belum ada anggota KK terkait LGBT juga karena KK ini sangat sensitif dan pastinya sangat resisten untuk Jawa Barat. Karena KK ini juga bagian dari tantangan pengurus wilayah untuk memberikan pemahaman kepada kader dan jaringan. Makanya dalam proses rekrutmen kader KPI, kami mengharuskan melalui pendidikan kader dasar dulu untuk memberikan pemahaman per-KPI-an, peran kader KPI, dan AD/ART KPI. Meskipun masih ada beberapa yang belum menerima, tetapi ini menjadi tantangan proses pengkaderan di Jawa Barat” (DW 2021, Diskusi Terarah 27 Maret).

KPI sangat mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat Jawa Barat yang cenderung dianggap memiliki religiusitas yang tinggi. Isu LGBT menjadi salah satu tantangan mereka karena resistensi terhadap isu ini dianggap cukup tinggi di Jawa Barat. Hal ini senada seperti yang disampaikan oleh LZ dan ZJ (2012) yang menyatakan bahwa organisasi dengan bentuk seperti Koalisi Perempuan, yang dilandasi oleh kumpulan isu atau sektor garapan, cenderung lebih rentan dibanding organisasi berbentuk serikat, yang didasari oleh daerah atau teritori tempat organisasi tersebut berada, untuk menjawab kebutuhan lokal, apakah itu kebutuhan pengadaan pendidikan usia dini (PAUD) atau isu lokal lainnya. Organisasi berdasarkan isu atau sektor bidang garapan, belum tentu mengakomodasi kebutuhan suatu daerah karena selalu berusaha untuk mencocokkan kebutuhan lokal dengan isu atau bidang garapan

yang ada dari koalisi induknya. Tampaknya, KPI tetap mengupayakan seluruh kelompok kepentingan yang diamanatkan di tingkat pusat tetap bisa direalisasikan di Jawa Barat. KPI Jawa Barat memobilisasi sumber daya dengan keragaman kegiatan, seperti pelatihan, sosialisasi dan edukasi, workshop dan webinar dengan bermitra dengan banyak pihak.

Dalam memobilisasi sumber daya, KPI Jawa Barat senantiasa melibatkan jejaring mitra, seperti pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, aktivis perempuan, organisasi pemerhati perempuan dan anak, serta lembaga lainnya, seperti DPRD dan Bawaslu. Fokus KPI terhadap isu perkawinan anak menjadikan mobilisasi sumber daya organisasi KPI banyak diarahkan pada isu-isu pencegahan isu tersebut. Sebagai contoh, KPI wilayah Jawa Barat mendukung revisi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, terkait dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Dalam revisi UU perkawinan yang telah disahkan oleh DPR RI pada 16 September 2019, usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun. Sebelum revisi, usia perkawinan perempuan yakni 16 tahun. KPI Jawa Barat merespons putusan tersebut dengan menggelar pertemuan untuk memperkuat jaringan Pencegahan Perkawinan Anak di Jawa Barat. KPI Jawa Barat melibatkan jaringan sipil dan pemerintah untuk mendorong payung hukum bagi pencegahan perkawinan anak, termasuk adanya pernyataan sikap menolak terjadinya perkawinan anak.

Terkait pendanaan, KPI berpegang pada iuran keanggotaan dan kerja sama-kerja sama yang dibangun dengan lembaga lainnya baik lembaga donor dari dalam dan luar negeri, termasuk pemerintah daerah provinsi Jawa Barat. Berbeda dengan KPI Jawa Barat, Rumpun Indonesia merupakan gerakan perempuan di Jawa Barat yang memiliki struktur organisasi sederhana dan berbentuk yayasan sehingga memiliki ketua dan bidang-bidang tertentu.

Disampaikan sejak awal bahwa Rumpun sendiri berasal dari singkatan Ruang Media Perempuan yang dibangun sebagai media untuk perempuan menyalurkan ekspresi dan berbagai kepentingannya melalui seni dan budaya. Hal ini seperti yang disampaikan narasumber yang merupakan salah satu inisiator Rumpun:

“Kepentingan yang diperjuangkan adalah seluruh kepentingan perempuan, terutama tentang isu-isu pelayanan publik bagi perempuan, misalnya pendidikan, kesehatan, kewarganegaraan (*citizenship*). Itu yang menjadi prioritas kami. Karena menurut kami, perempuan itu menjadi yang pertama dalam keluarga yang menjadi

awal mula masuk kepada layanan-layanan tersebut. Selain itu, Rumpun Indonesia juga menggunakan seni sebagai sarana penyampaian pesan-pesan, nilai-nilai integritas. Misal ketika ada ketidakadilan, maka kami turun dengan cara-cara tersebut" (SM 2021, Diskusi Terarah 30 Maret).

Meskipun terdapat struktur dalam yayasan, Rumpun memiliki tim inti berjumlah 9 orang yang dapat dikatakan sebagai pendiri. Namun, belum memiliki sumber daya anggota yang tetap dan tidak ada sistem keanggotaan dan proses kaderisasi. Hal ini berkaitan dengan kegiatan Rumpun yang lebih banyak bersifat tidak rutin tetapi dalam berbagai kegiatan selalu melibatkan relawan dari komunitas perempuan lainnya. Rumpun tidak memiliki cabang di kota/kabupaten lain, hanya ada di Kota Bandung. Dalam upaya memobilisasi partisipasi publik dan memperkenalkan organisasinya, Rumpun aktif menggunakan media seni dan budaya. Setiap kali menyelenggarakan kegiatan, Rumpun membentuk komite atau kepanitiaan yang melibatkan relawan dari berbagai komunitas, khususnya komunitas perempuan.

Sebagai bagian dari strategi mobilisasi, pada pertengahan tahun 2019, Rumpun Indonesia bekerja sama dengan komunitas Indonesia.id menginisiasi kampanye "Seberapa Indonesianya Kamu" untuk merayakan keberagaman melalui seni tari daerah dan *flashmob*. Kegiatan ini merujuk pada Laporan Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2018 bekerja sama dengan Wahid Foundation dengan UN Women, yang menunjukkan bahwa kecenderungan intoleran di kalangan perempuan sebesar 55 persen perempuan atau lebih sedikit dibanding laki-laki yang mencapai 59,2 persen. Karenanya, Rumpun merasa perlu untuk memastikan isu intoleran tidak terjadi di Jawa Barat melalui kampanye tersebut. Media seni tari dipilih sebagai strategi budaya yang berakar dari nilai-nilai kearifan lokal selain menjadi tradisi juga berupaya mengenalkan keragaman dan budaya Indonesia.

Salah satu contoh yang dilakukan oleh Rumpun Indonesia, terlihat pada tahun 2022 dalam memperingati Hari Perdamaian Dunia bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan "Tari Merak Sadunya" yang merupakan perhelatan kolosal untuk merayakan khasanah kesenian dan kebudayaan yang menjadi motor penggerak budaya Sunda. Dalam kegiatan ini, Rumpun Indonesia juga melakukan kolaborasi dengan seniman Jawa Barat dan komunitas seni lainnya, yang pada pelaksanaannya diikuti tidak kurang oleh 1000 penari. *Tagline* yang digunakan pada kegiatan tersebut

adalah #perempuangotongroyong. Sebagai rangkaian kegiatan kampanye melalui tari massal, Rumpun juga menyelenggarakan pendidikan masyarakat melalui webinar "Gerak Perempuan untuk Kehidupan yang Lestari". Webinar ini menghadirkan narasumber dari pemerintah, akademisi, dan perwakilan Rumpun Indonesia.

Selain melakukan mobilisasi melalui berbagai bentuk kampanye, Rumpun Indonesia juga aktif melakukan peningkatan kapasitas dalam bentuk diskusi-diskusi interaktif seperti yang disampaikan oleh narasumber:

"...Kita membuat *parenting* anti korupsi, film anti korupsi, musik dan wayang anti korupsi...kita juga berjejaring dengan teman-teman laki-laki karena kita ingin melibatkan tidak hanya perempuan...*capacity building* yang pernah kita lakukan salah satunya target kita ke ibu-ibu PKK di antaranya tentang layanan BPJS (nilai integritas di layanan publik), gerakan difabel anti korupsi (SM 2021, Diskusi Terarah 30 Maret).

Pendanaan kegiatan Rumpun, sebagian besar berasal dari swadaya anggota Rumpun. Rumpun juga mengupayakan donasi publik yang umumnya mitra dari pemerintah daerah melalui dana perusahaan sosial (CSR), maupun dari para donatur kegiatan lainnya. Rumpun dan KPI Jawa Barat sering bermitra dalam berbagai kegiatan yang ditujukan pada kampanye event internasional, seperti Hari Perempuan Internasional maupun Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Sasaran utama Rumpun adalah perempuan perkotaan, dengan mayoritas peserta berasal dari kelompok menengah berpendidikan relatif tinggi.

Meskipun Samahita memiliki struktur organisasi yang sederhana, didukung oleh sekitar 30 orang dan jejaring lainnya terutama untuk pendampingan dan penanganan kasus, seperti dengan pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan komunitas atau lembaga layanan lainnya. Dalam struktur yang dimiliki, tidak ada istilah ketua melainkan "penanggung jawab", contohnya penanggung jawab program, penanggung jawab kampanye, penanggung jawab edukasi, dan penanggung jawab pendampingan. Relawan yang mendukung aktivitas Samahita berbeda dengan Rumpun yang hadir per kegiatan, sedangkan relawan Samahita tidak hadir hanya per kegiatan namun dilibatkan pada hampir keseluruhan aktivitas Samahita karena diharapkan dapat membantu proses pendampingan kasus.

Untuk itu, Samahita secara rutin melakukan peningkatan kapasitas bagi para relawannya terutama pengetahuan berkaitan dengan isu-isu kekerasan

seksual dan kekerasan dalam berpacaran. Berbeda latar belakang dengan kedua organisasi/gerakan lainnya yang telah dibahas oleh peneliti sebelumnya, Samahita sebelumnya hanya merupakan sebuah gerakan untuk mengkampanyekan isu-isu global tanpa memiliki struktur organisasi dan memperlihatkan bagaimana mereka mampu mengakomodasi kebutuhan kelompok muda. Hal ini diuraikan lebih lanjut oleh narasumber di bawah ini:

“Samahita mulai bergerak di tahun 2013. Dahulu namanya bukan Samahita, namun merupakan kampanye global yang diadakan serentak di dunia dan salah satunya di Indonesia. Bandung merupakan salah satu kota yang mengadakannya juga. Namun pada tahun 2014, semakin banyak yang tertarik dan mengikuti. Pada tahun 2015, mulai banyak korban yang bercerita kepada kami terkait kekerasan yang dialami, berkonsultasi kepada kami. Pada tahun 2015, kami sepakat membutuhkan wadah yang fokus ke dalam isu KDP Remaja dan akhirnya pada 16 Februari 2015 dibentuklah Samahita yang tujuannya *support* korban-korban atau penyintas kekerasan seksual. Tetapi seiring perkembangannya, kami juga fokus pada isu kekerasan berbasis gender” (AY 2021, Diskusi Terarah 9 April).

Berbeda dengan organisasi dan gerakan perempuan lainnya dalam penelitian ini, Samahita melakukan mobilisasi sumber daya lebih sering melalui aksi-aksi di jalan dengan tema tertentu dan berkolaborasi dengan komunitas lainnya yang memiliki fokus sama. Secara rutin tiap tahunnya, Samahita menginisiasi aksi bersama pada event-event, seperti Women’s March, Dukungan terhadap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (sekarang dikenal sebagai UU TPKS). Dalam upaya memobilisasi sumber daya, Samahita tampak konsisten dalam penentuan isu, yakni berfokus pada isu kekerasan seksual dan diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti LGBT yang sering kali tidak menjadi perhatian dan ditolak oleh gerakan atau organisasi perempuan lainnya di Jawa Barat, sekalipun terdapat klaim progresifitas dalam aktivisme yang dilakukan.

Mengacu pada Locher, perbedaan antara gerakan sosial (*social movement*) dan aksi kolektif lainnya, seperti *Crowd*, *Riot*, *Rebel*, dan *Fads*, maka dapat dilihat bahwa gerakan perempuan di Jawa Barat merupakan gerakan sosial karena berdasarkan aspek pengorganisasian. Seluruh organisasi perempuan yang diteliti diorganisir dengan baik, terdapat pembagian tugas, adanya strategi yang dirancang dan memiliki pemimpin (*leader*) yang jelas. Selain itu, semua organisasi perempuan yang diteliti memenuhi kriteria partisipasi yang didasarkan pada kesadaran kolektif serta melakukan upaya promosi dan mencari dukungan dari banyak pihak. Sementara

itu, aksi kolektif lainnya sebagian besar tidak diorganisir dengan baik, terjadi tanpa perencanaan, dan tidak ada pertimbangan serta kesadaran penuh dari peserta.

Selanjutnya, mengikuti Dieter Opp (2009, hlm. 139), sumber daya gerakan tidak hanya mencakup dana, tetapi juga akses media, dukungan simpatisan, loyalitas anggota, ketersediaan ruang, serta pengetahuan dan kapasitas aktor. Berdasarkan kriteria ini, gerakan perempuan berbasis sekuler di Jawa Barat menunjukkan struktur mobilisasi yang relatif kuat, ditopang oleh jaringan media, simpatisan, dan kapasitas organisasi yang memadai.

Sebagian besar gerakan dan organisasi perempuan di Jawa Barat yang diteliti, memiliki model dan struktur organisasi yang cenderung non-hierarki, tidak kaku, menghindari bahaya oligarki, kepemimpinan yang bersifat kolektif dan struktur yang lebih responsif pada kebutuhan individu, dan cenderung anti birokrasi. Beberapa ciri yang disebutkan tampak sangat jelas dalam karakter dan gerakan/organisasi perempuan sekuler. Meskipun demikian, gerakan/organisasi perempuan berbasis agama yang moderat seperti Cherbon Feminist pun memiliki struktur organisasi yang tidak lagi kaku serta lebih terbuka dan responsif pada kebutuhan individual.

Penutup

Berdasarkan hasil riset dan pembahasan, terdapat beberapa simpulan. Pertama, pada Era Reformasi, meskipun terfragmentasi dan bersifat non-elektoral, gerakan perempuan di Jawa Barat memiliki kekuatan dalam hal kebebasan, kemandirian, dan inklusivitas. Hal ini dimungkinkan oleh peluang politik dalam rezim demokrasi yang memberi ruang lebih luas bagi aktivitas gerakan. Gerakan perempuan relatif bebas menentukan isu serta memperjuangkan beragam kepentingan perempuan, baik kebutuhan praktis maupun strategis gender. Namun, kelompok perempuan marginal belum sepenuhnya terlibat dan memperoleh manfaat dari keberadaan gerakan ini. Di sisi lain, resistensi terhadap gagasan feminisme dan kesetaraan gender masih tinggi, baik dari organisasi penentang feminisme, maupun dari sebagian kelompok berbasis agama.

Kedua, struktur mobilisasi yang dilakukan oleh gerakan perempuan di Jawa Barat pada Era Reformasi telah membentuk suatu gerakan yang menitikberatkan pada berbagai isu yang berkaitan dengan perempuan, seperti kekerasan berbasis gender, kekerasan terhadap perempuan, kesetaraan gender, hak reproduksi, serta

partisipasi perempuan dalam politik. Gerakan ini juga bertujuan memberikan dukungan, advokasi, dan pemahaman mengenai hak-hak perempuan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu tersebut. Selain itu, mereka aktif memperjuangkan kesetaraan gender dan mengkritisi struktur sosial yang mendukung ketidakadilan dengan terlibat dalam kegiatan-kegiatan, seperti advokasi, pengorganisasian, dan kampanye yang bertujuan untuk mengubah pandangan dan praktik yang merugikan perempuan dalam masyarakat. Dalam hal struktur mobilisasi, seluruh gerakan atau organisasi perempuan memenuhi kriteria keterlibatan partisipan yang didasarkan atas pertimbangan dan kesadaran, melakukan publisitas, dan berusaha mencari dukungan dari banyak orang. Seluruh gerakan atau organisasi perempuan di Jawa Barat, khususnya Samahita, KPI Jawa Barat, Rumpun Indonesia, dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial baru dan menyetujui pendapat Mc bahwa gerakan sosial baru mengambil bentuk gerakan yang plural dengan keragaman isu, seperti gerakan kaum urban, gerakan lingkungan, gerakan feminis, gerakan antirasisme, gerakan etnik, gerakan hak-hak kelompok gay dan hak-hak perempuan, gerakan dampak globalisasi, dan sebagainya.

Ketiga, meskipun salah satu dari gerakan perempuan di Jawa Barat dalam penelitian ini memiliki basis di pedesaan, namun penelitian ini belum memperlihatkan secara eksplisit keterkaitan aktivisme gerakan perempuan yang dilakukan oleh organisasi dengan aktivisme gerakan perempuan di masyarakat yang telah terbentuk sejak lama melalui PKK, Posyandu, dan komunitas lainnya. Sangat penting bagi gerakan perempuan lainnya untuk mendukung tercapainya inklusi gender dan meningkatkan pengaruh perempuan dalam berbagai lingkup kehidupan. Meskipun dalam dua dekade terakhir, kemajuan tersebut mulai terlihat, namun pencapaian ini masih belum merata di semua lokasi, terutama di daerah pedesaan.

Keempat, tantangan yang dihadapi oleh gerakan perempuan di Jawa Barat adalah kurangnya pengorganisasian yang terstruktur di tingkat akar rumput. Gerakan perempuan di Jawa Barat, terutama yang bersifat sekuler, seperti Samahita dan Rumpun (yang tidak memiliki latar belakang agama tertentu), perlu memperluas sasaran gerakan mereka tidak hanya pada kalangan menengah dan daerah perkotaan saja. Hal ini penting mengingat Jawa Barat memiliki 27 kabupaten dan kota sehingga perlu dilakukan seperti yang dilakukan oleh KPI Jawa Barat.

Berdasarkan temuan tersebut, isu-isu terkait kebutuhan gender strategis seperti kekerasan seksual, kesetaraan gender, intoleransi, anti korupsi, anti radikalisme perlu menyoal kelompok perempuan pedesaan atau pinggiran kota yang sering kali menjadi kelompok yang rentan menjadi korban.

Daftar Pustaka

- Alvarez, S. E. 1990. *Engendering Democracy in Brazil: Women's Movements in Transition Politics*. Princeton: Princeton University Press.
- Arivia, G. & Subono, N. I. 2017. *Seratus Tahun Feminisme di Indonesia, Analisis terhadap Para Aktor, Debat, dan Strategi*. Friedrich Ebert Stiftung. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/15114.pdf>.
- Beckwith, K. 2000. Beyond Compare? Women's Movements in Comparative Perspective. *European Journal of Political Research*, 37(4), hlm. 431–468. <https://doi.org/10.1111/14756765.00521>.
- Beckwith, K. 2005. A Common Language of Gender? *Politics & Gender*, 1(1), hlm. 128–137. doi:10.1017/S1743923X05211017.
- Beckwith, K. 2007. Mapping Strategic Engagements: Women's Movements and The State, *International Feminist Journal of Politics*, 9(3), hlm. 312–338, <https://doi.org/10.1080/14616740701438218>.
- Budianta, M. 2006. Decentralizing Engagements: Women and the Democratization Process in Indonesia. *Signs*, 31(4), hlm. 915–923. <https://doi.org/10.1086/504338>.
- Bystydzienski, J. M. & Sekhon, J. (Ed.). 1999. *Democratization and Women's Grassroots Movements*. Indiana University Press.
- Creswell, J. W. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among ve Approaches (2nd Ed.)*. Sage: Thousand Oaks, CA.
- Dhewy, A. 2019. Perempuan dan Demokrasi Women and Democracy dalam *Perempuan dan Demokrasi*, hlm. iii, Yayasan Jurnal Perempuan.
- Edwards, L. 2010. Chinese Feminism in a Transnational Frame: between internationalism and Xenophobia. In *Women's Movements in Asia*, hlm. 63–84. Routledge.
- Kriesi, H. 2005. Economics and Politics: Towards a Dialogue between Economics and Political Science. *Swiss political science review*, 11(4), hlm. 249–268.
- Locher, D. A. 2002. *Collective Behavior*, p. 24. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Margret, A. 2019. Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis. *Jurnal Perempuan*, 24(2), hlm. 89–100.
- McAdam, D., McCarthy, J., & Zald, M. 1996. *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. Cambridge: University Press.
- Opp, K. D. 2009. *Theories of Political Protest and Social Movements: A Multidisciplinary Introduction, Critique, and Synthesis (1st Ed.)*. Routledge.

Rahayu, R. I. 2007. Konstruksi Historiografi Feminisme Indonesia dari Tutar Perempuan. Makalah dalam *Workshop Historiografi Indonesia: di antara Historiografi Nasional dan Alternatif*, Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM dan Australia Research Council, Hotel Yoga Plaza, Yogyakarta, hlm. 2-4.

Singh, R. 2001. *Social Movements, Old and New: A Post-Modernist Critique*. Sage: New Delhi.

Stivens, M. 2000. Becoming Modern in Malaysia: Women at the End of the Twentieth Century. Dalam *Women in Asia*, hlm. 16-38. Routledge.

van Witteloostuijn, A. O. 2013. Applying Intersectionality as a Method: A Critical Analysis of How to Apply Feminist and Intersectional Methodologies dalam *Qualitative Research*. Utrecht University.

Wieringa, S. E. 1999. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Garba Budaya dan Kalyanamitra: Jakarta.

Catatan Kaki

- 1 <https://antronesia.com/event-one-billion-rising-bandung-menari-untuk-melawan-kekerasan-pada-perempuan-bersama-komunitas-samahita/> diunduh pada tanggal 27 Desember 2019).
- 2 Selengkapnya dapat dilihat pada artikel yang bertajuk “Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Barat Ajak Orang Muda dan Perempuan Bangun Pemberdayaan dan Pelindungan” di laman website https://pasjabar.com/2023/03/21/koalisi-perempuan-indonesia-jabar-ajak-orang-muda-dan-perempuan-bangun-pemberdayaan-dan-pelindungan/?fbclid=IwAR08tdusJCbsePq8540DMaV4x3mLlcpZ0om2lRoMMZvCxFwck_OaR179Ds (diakses pada tanggal 9 Juni 2023).
- 3 Lihat lebih lanjut di www.instagram/sekoper_cinta.
- 4 Kelompok Kepentingan yang diperjuangkan oleh KPI di tingkat pusat: (1) Perempuan Masyarakat Adat; (2) Perempuan Lansia (lanjut usia) dan Jompo; (3) Perempuan Profesional; (4) Perempuan Pekerja Sektor Informal; (5) Perempuan Masyarakat Miskin Kota; (6) Perempuan Masyarakat Miskin Desa; (7) Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa; (8) Perempuan yang Dilacurkan (Pedila); (9) Perempuan Buruh; (10) Perempuan Janda, Perempuan Kepala Keluarga dan Perempuan Lajang; (11) Anak Perempuan Marjinal; (12) Perempuan Petani; (13) Perempuan Pesisir dan Nelayan; (14) Perempuan Ibu Rumah Tangga; (15) Lesbian, Biseksual, dan Trans-gender; (16) Perempuan Penyandang Cacat; (17) Perempuan Buruh Migran; (18) Perempuan Pekerja Rumah Tangga. <https://www.koalisperempuan.or.id/tentang/kelompok-kepentingan/>.